

**PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**



Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2013-2018) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis BAPPEDA dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.

### **5.1. Rencana Program**

**Program** adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra SKPD. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh BAPPEDA dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” yang sama yakni pembentukan BAPPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan daerah berkualitas. Berikut program-program BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur yang disusun untuk mencapai visi dan misinya:

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan Strategi Pertama dan Kedua**

| Sasaran   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran</li> </ul> |  |
|---|---|--|--|
| No.   | Strategi/Kebijakan  | Program/kegiatan   | Indikator Kinerja  |
| <b>S1: Membangun Manajemen kinerja dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan</b> |   |  |  |
| 1.  | Penyediaan pedoman teknis yang komprehensif dalam penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan   | Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah tahunan            |
|   |   | Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah tahunan            |
| 2.  | Pengintegrasian arsitektur kinerja pembangunan Nasional, Daerah, SKPD dan Kabupaten/Kota                | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah   | Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah jangka menengah    |
| 3.  | Pengintegrasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota       | Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah jangka menengah    |
| 4.  | Pengembangan dan integrasi penanganan permasalahan - permasalahan pembangunan                           | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang  | Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah jangka panjang     |
| 5.  | Penjaringan aspirasi dan partisipatif stakeholder skala nasional dan regional                           | Program Kerjasama Pembangunan  | Persentase integrasi pembangunan regional Kalimantan                     |
| <b>S2: Optimalisasi peran BAPPEDA di TAPD dalam mengkonsistenkan perencanaan dan penganggaran</b>                 |   |  |  |
| 1.  | Peningkatan profesionalisme TAPD dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan               | Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah   | Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang efektif |
| 2.  | Pengintegrasian sistem informasi pembangunan dan keuangan daerah  | Program Pengembangan Data/Informasi  | Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang efektif |

**Tabel 5.2**  
**Rencana Program dan Kegiatan Strategi Ketiga**

| Sasaran   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi serta fungsi peran koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul> |   |
|---|--|---|---|
| No.   | Strategi/Kebijakan   | Program/kegiatan  | Indikator Kinerja   |
| <b>S3: Penyediaan dan Pemutakhiran data dan informasi bahan perencanaan pembangunan dan Optimalisasi penggunaan teknologi informasi</b> |  |   |   |
| 1.  | Penyediaan data dan informasi pembangunan yang lebih akurat dan tepat waktu  | Program Pengembangan data dan Informasi (2014)<br>Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial (2015)  | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan |
| 2.  | Pengintegrasian sistem informasi pembangunan antarbidang di Bappeda, antara Bappeda dan SKPD, serta antara Provinsi dan Kab/Kota | Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan  | Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan               |
|   |  | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi  | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi    |
|   |  | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh   | Persentase hasil verifikasi dokumen KIPi MALOY                  |
|   |  | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar   | Persentase perencanaan pengembangan kab/kota                    |

**Tabel 5.3**  
**Rencana Program dan Kegiatan Strategi Keempat**

| Sasaran  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi serta fungsi peran koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul> |  |
|--|--|---|--|
| No.  | Strategi/Kebijakan   | Program/kegiatan  | Indikator Kinerja  |
| <b>S4: Optimalisasi peran BAPPEDA dalam melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian di SKPD dan Kab/kota</b> |  |   |  |
| 1.   | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan                          | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi  | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi   |
|  |  | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam  | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan sektor pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam |
|  |  | Program Pengarustamaan Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan Daerah   | Persentase koordinasi perencanaan pengarustamaan perubahan iklim   |
| 2.   | Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan SKPD (tahunan) | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah   | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah                  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh     | Persentase koordinasi perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh                        |
|   |   | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam              | Persentase koordinasi perencanaan pembangunan sektor pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam |
| 3 | Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan tahunan | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur        | Persentase koordinasi perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Aparatur                           |
|   |   | Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur                           | Persentase koordinasi perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Aparatur                           |
|   |   | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase koordinasi perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia                                |
|   |   | Program Perencanaan Sosial dan Budaya                                   | Persentase koordinasi perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia                                |

**Tabel 5.4**  
**Rencana Program dan Kegiatan Strategi Kelima**

| Sasaran   |  | • Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kaltim                            |   |
|---|--|--|---|
| No.   | Strategi/Kebijakan   | Program/kegiatan   | Indikator Kinerja   |
| <b>S5: Mengintegrasikan sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota</b> |  |  |   |
| 1.  | Pengevaluasian keselarasan implementasi peraturan perundangan perencanaan pembangunan daerah di tingkat pusat hingga tingkat provinsi/kabupaten/kota di Kalimantan Timur | Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase hasil capaian perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan |
|   |  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah tahunan   |
|   |  | Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur                          | Persentase hasil capaian perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan |
|   |  | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam             | Persentase hasil capaian perencanaan                            |

|    |  |  | Pembangunan Daerah Tahunan   |
|----|--|--|--|
| 3. | Perbaikan pengelolaan kinerja pembangunan (impact, Outcome dan Output) | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah            | Persentase Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah |
| 4. | Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan daerah           | Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah                    |
| 5. | Perbaikan integrasi berbagai laporan dan evaluasi kinerja              | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | Persentase efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah                    |

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun mendatang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan

Program ini disusun untuk mendukung perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama lima tahun ke depan. Perencanaan pembangunan akan difokuskan pada pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Dalam mengaplikasikan perencanaan pembangunan, dukungan dari seluruh komponen masyarakat, aparatur pemerintah, hingga pihak swasta menjadi syarat mutlak tercapainya target-target kinerja yang telah disusun berdasarkan analisis dan kajian kewilayahan. Oleh karena itu, perlu pemilahan yang jelas pada tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaku pembangunan dalam menjalankan setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.

### 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam membangun suatu daerah perencanaan sangat menentukan hasil dari pembangunan. Dalam pembangunan, perencanaan merupakan titik awal yang mampu memengaruhi hasil capaian pembangunan. Dengan program perencanaan pembangunan daerah, diharapkan BAPPEDA mampu meramu perencanaan yang handal sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

### 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Dalam bidang perencanaan pembangunan daerah salah satu bagian adalah perencanaan pembangunan Daerah Jangka Menengah, yang kemudian akan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra, dan Renja. Sehingga dengan

Program perencanaan pembangunan daerah jangka menengah ini diharapkan dalam penyusunan dokumen RPJMD, akan dihasilkan dokumen yang mampu menjadi pedoman yang dapat merangkul segala aspek dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

**4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang**

Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang merupakan perencanaan yang memiliki pandangan jauh kedepan dalam bagian tata pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam program ini akan dihasilkan suatu dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD), yang memedomani RPJPN. Sehingga dokumen RPJPD ini merupakan langkah besar dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui program ini diharapkan dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dan kemudian akan mampu menarik dokumen perencanaan lainnya, yang akan berimbas pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

**5. Program Pengarustamaan Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**

Melihat tata letak geografis Negara Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya, daerah ini mempunyai perubahan iklim yang mampu memengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan Mengarusutamakan perubahan iklim, hal ini menjadi suatu tindakan yang sangat tepat guna dalam mengantisipasi segala kemungkinan dampak yang diberikan oleh perubahan iklim. Dengan merasuki perencanaan pembangunan daerah dan mengarusutamakan perubahan iklim pada perencanaan pembangunan daerah maka akan terbentuk perencanaan daerah yang handal dan mampu meminimalisir segala bentuk dampak negatif dari perubahan iklim.

**6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi**

Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi merupakan bagian dari program perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pada pengembangan ruang gerak roda perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Kinerja bidang ekonomi terkait pada perencanaan operasional kegiatan serta mengkoordinasikan penyusunan program perekonomian tahunan. Perlu perhatian khusus pada permasalahan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur saat ini, terutama pada sektor migas dan batubara yang kian hari kian menipis produktivitasnya padahal sektor ini merupakan kontributor utama dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

**7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**

Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam merupakan salah satu program perencanaan pembangunan daerah yang berbasis tata ruang. Bidang prasarana wilayah

dan sumber daya alam merencanakan operasional kegiatan serta mengkoordinasikan penyusunan program tahunan. Selain itu dalam merencanakan prasarana wilayah dan sumber daya alam, harus melakukan sinkronisasi dengan program-program lain terutama yang memiliki ruang lingkup kewilayahan. Secara umum, bidang perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam akan mengoordinir tugas-tugas sub-sub bidang yang berada di bawahnya untuk melaksanakan kinerja secara optimal demi tercapainya pembangunan daerah.

**8. Program Perencanaan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah**

Perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah merupakan program perencanaan pembangunan daerah yang difokuskan pada peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pembangunan berbasis kewilayahan. Bidang ini merencanakan operasional kegiatan serta mengkoordinasikan penyusunan program tahunan terkait peningkatan prasarana dan pengembangan wilayah. Sisi positif dalam program ini sekaligus pendukung utama dalam pelaksanaan pengembangan wilayah adalah sarana maupun infrastruktur perhubungan yang harus diperhatikan agar terjadi peningkatan aksesibilitas terutama di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, bidang prasarana dan pengembangan wilayah akan melaksanakan perencanaan pembangunan dengan mengoordinir tugas-tugas sub-sub bidang yang berada di bawahnya melalui program ini.

**9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh merupakan bagian dari program perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA menyusun program ini untuk mengembangkan wilayah-wilayah strategis terutama yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah strategis dan cepat tumbuh di Provinsi Kalimantan Timur cukup potensial sehingga diharapkan dengan adanya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh.

**10. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar**

Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perencanaan pembangunan daerah dalam rangka merealisasikan pusat-pusat jasa, industri, perdagangan, pemerintahan, dan sebagainya yang merupakan penunjang perekonomian daerah. Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah perkotaan yang maju jika dibandingkan dengan wilayah Kalimantan

lainnya, sehingga tidak salah jika BAPPEDA menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan basis perkotaan dan berusaha memperluas jaringan perkotaan yang berkualitas.

**11. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur**

Perencanaan terkait pemerintahan dan aparatur merupakan sisi lain dari pengejawantahan reformasi birokrasi yang digaungkan untuk mencapai *good governance*. Fokus utama dalam perencanaan ini adalah bagaimana merubah paradigma aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat sehingga harus melaksanakan pelayanan prima kepada publik. Diharapkan dengan adanya perencanaan ini, birokrasi pemerintahan sebagai subyek utama pembangunan akan berjalan dengan baik sehingga dapat memacu kinerja pencapaian target-target pembangunan daerah.

**12. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu program dasar pembangunan daerah karena menyangkut tentang kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia memiliki banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih sulitnya beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dalam mencapai akses pendidikan maupun kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi program antara bidang pengembangan sumber daya manusia dengan bidang teknis lainnya agar terjadi keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**13. Program Perencanaan di Bidang Sosial dan Budaya**

Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan sosial dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, perencanaan di bidang sosial dan budaya akan meningkatkan harmonisasi masyarakat terkait kehidupan sosialnya dan keanekaragaman budayanya sehingga kelestarian sistem masyarakat akan tetap terjaga. Program ini menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan operasional kegiatan serta mengkoordinasikan penyusunan program tahunan bidang sosial dan budaya.

**14. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini disusun dalam rangka mencapai Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur yaitu perencanaan pembangunan yang berkualitas. Untuk mencapai visi tersebut, BAPPEDA diharapkan dapat mencapai kualitas perencanaan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran agar efektivitas penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan.



**15. Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah**

Program ini disusun sebagai salah satu upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam menyusun kebijakan anggaran pembangunan daerah agar dapat diprioritaskan kepada permasalahan-permasalahan pokok terutama pada isu-isu strategis pembangunan.

**16. Program Pengembangan Data/Informasi (2014) /Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial (2015)**

Program ini disusun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dimana data/informasi merupakan faktor penentu keberhasilan dari perencanaan pembangunan. Semakin akurat sebuah data/informasi, maka semakin baik pula kualitas perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, program pengembangan data/informasi disusun sebagai upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

**17. Program Kerjasama Pembangunan**

Program ini disusun dalam rangka pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah sebagai salah satu alternatif dalam mempermudah pencapaian Visi dan Misi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur. Kerjasama saling menguntungkan dalam pembangunan daerah dilakukan dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal pemerintah maupun investor swasta dalam hal peningkatan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

**18. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu program utama dalam peningkatan mutu dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Program ini disusun untuk mendukung perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah selama lima tahun ke depan sehingga setiap tahapannya memerlukan pengendalian dan evaluasi baik di bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan aparatur, serta pengembangan sumber daya manusia.

**5.2. Rencana Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

**A. Program dan Kegiatan yang terkait Perencanaan Pembangunan**

Program ini merupakan program yang digunakan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dalam merencanakan pembangunan daerah.

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan  
Program Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk mencapai visi dan misi Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
  - Penyusunan rancangan RKPD;
  - Penyelenggaraan musrenbang RKPD; dan
  - Penetapan RKPD.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah
  - Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
  - Kaltim Summit
3. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
  - Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif/Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
  - Penyusunan masterplan kawasan industry berbasis pangan; dan
  - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
5. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
  - Koordinasi penyusunan *masterplan* pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  - Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah
6. Program Pengarustamaan Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Fasilitasi dan pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon kab/kota
  - Pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca
7. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
  - Penyusunan perencanaan kawasan industry pelabuhan Internasional
  - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
  - Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
- 9. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
  - Koordinasi perencanaan penanganan perumahan; dan
  - Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan.
- 10. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
  - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan; dan
  - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur.
- 11. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - Koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat; dan
  - Koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan, mental, dan spiritual.
- 12. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
  - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; dan
  - Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan.
- 13. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
- 14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah
  - Penyusunan Rancangan RPJMD 2018-2023;
  - Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD; dan
  - Penetapan RPJMD 2013 -2018.
- 15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang
  - Penyusunan Rancangan Perubahan RPJPD 2005-2025; dan
  - Penetapan Perubahan RPJPD 2005-2025.
- 16. Program Pengembangan Data/Informasi (2014) / Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial (2015)
  - Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan;
  - Penyebarluasan capaian pembangunan daerah;
  - Koordinasi penyelenggaraan One Data One Map
  - Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - Peningkatan sistem informasi dan updating data.
- 17. Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
  - Penyusunan rancangan KUA, PPAS APBD, dan P-APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- 18. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- Monitoring dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan.
  - Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
19. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ);
  - Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah;
  - Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - Gugus kendali pembangunan Provinsi Kalimantan Timur; dan
  - Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran.
20. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
  - **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PPW)**
21. Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
22. Program Kerjasama Pembangunan
- Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah; dan

#### **B. Program dan Kegiatan Teknis/Manajerial Bersama**

Program ini merupakan program yang dapat digunakan oleh setiap SKPD baik secara teknis maupun manajerial. Program dan terkait teknis atau manajerial yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa surat menyurat;
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  - Penyediaan alat tulis kantor;
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;



- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - Penyediaan makanan dan minuman;
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
  - Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah; dan
  - Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  - Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip;
  - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
  - Pelayanan acara-acara Pemerintah Provinsi dan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur; dan
  - Sertifikasi sistem manajemen ISO 9001-2000 Provinsi Kalimantan Timur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
  - Pengadaan pakaian kerja lapangan;
  - Pengadaan pakaian KORPRI; dan
  - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; dan
  - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
- Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
  - Penyusunan analisis jabatan;
  - Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah;
  - Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah;
  - Koordinasi penyusunan Rencana Kerja; dan

- Koordinasi penyusunan Rencana Strategis.
- 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah

### 5.3. Indikator Pencapaian Tujuan

**Masukan (*Input*)** adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan keluaran (*output*). *Input* kegiatan meliputi sumber daya manusia, dana, dan fasilitas.

**Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan akan tercapai dari suatu kegiatan baik berupa produk jasa fisik maupun non fisik seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

**Hasil (*Outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh *stakeholders* dan masyarakat.

**Dampak (*Impact*)** adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (persen/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (persen), dan sebagainya.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh BAPPEDA pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan serta kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif.

Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur yang direncanakan pada periode Tahun 2013–2018 dapat dilihat pada Tabel 5.5.

### 5.4. Pendanaan Indikatif

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh

karena itu, strategi pembiayaan dalam perencanaan strategis pembangunan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan BAPPEDA. Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi dari pemerintah pusat.

Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada lampiran tabel 5.5.

Tabel 5.5

Program, Kegiatan, indikator dan Pendanaan Indikatif (dalam Juta)

| No  | PROGRAM/KEGIATAN                               |                                 | INDIKATOR  | SATUAN | TARGET KINERJA               |           |            |           |   |       |   |       |   |          |  | Bid.Penang<br>gungjawab |      |
|-----|--|---------------------------------|--|--------|------------------------------|-----------|------------|-----------|---|-------|---|-------|---|----------|--|-------------------------|------|
|     |  |                                 |  |        | TAHUN.2013<br>(KONDISI AWAL) |           | TAHUN 2014 |           | TAHUN 2015  |       | TAHUN 2016  |       | TAHUN 2017  |          | TAHUN 2018<br>(KONDISI AKHIR)                      |                         |      |
|     |  |                                 |  |        | TARGET                       | RP        | TARGET     | RP        | TARGET  | RP    | TARGET  | RP    | TARGET  | RP       | TARGET   |                         | RP   |
| (1) | (2)  |                                 | (3)  | (4)    | (5)                          | (6)       | (7)        | (8)       | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13)  | (14)     | (15)   | (16)                    | (17) |
| 1   | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan |                                 | Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah tahunan  | %      | --                           | --        | --         | --        | 93  | 2,350 | 95  | 2,350 | 97  | 2,350    | 99   | 2,350                   |      |
|     | a  | Penyusunan Rancangan RKPD       | Persentase hasil verifikasi dokumen rancangan RKPD             | %      | --                           | --        | --         | --        | 90  | 1,225 | 95  | 1,225 | 95  | 1,151.50 | 100  | 1,151.50                |      |
|     | b  | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Jumlah peserta yang menghadiri Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Orang  | --                           | --        | --         | --        | Rakor= 250 org<br>Forum= 450 org<br>Musren= 600 org | 2,200 | Rakor= 250 org<br>Forum= 450 org<br>Musren= 600 org | 2,200 | Rakor= 250 org<br>Forum= 450 org<br>Musren= 600 org | 2,200    | Rakor= 250 org<br>Forum= 450 org<br>Musren=600 org | 2,200                   |      |
|     | c  | Penetapan RKPD                  | Keluarnya Peraturan Gubernur tentang RKPD tepat waktu          | Waktu  | --                           | --        | --         | --        | Tepat Waktu   | 150   | Tepat Waktu   | 150   | Tepat Waktu   | 150      | Tepat Waktu  | 150                     |      |
| 2   | Program Perencanaan Pembangunan Daerah         |                                 | Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah tahunan  | %      | 73.06                        | 10,916.25 | 90         | 13,257.19 | --  | --    | --  | --    | --  | --       | --   |                         |      |
|     | a  | Penyusunan rancangan RKPD       | Persentase hasil verifikasi dokumen rancangan RKPD             | %      | 90                           | 1,300     | 90         | 1,224.84  | --  | --    | --  | --    | --  | --       | --   |                         |      |



|  |   |   |  |         |   |          |  |          |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|--|---|---|--|---------|---|----------|--|----------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
|  | b | Penyelenggaraan musrenbang RKPD                                     | Jumlah peserta yang menghadiri Penyelenggaraan Musrenbang RKPD                                       | Orang   | Rakor= 250 org<br>Forum= 400 org<br>Musren= 600 org | 1,975    | Rakor= 250 org<br>Forum= 400 org<br>Musren=650 org | 2,166.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  | c | Penetapan RKPD  | Keluarnya Peraturan Gubernur tentang RKPD tepat waktu  | Waktu   | Tepat Waktu   | 150      | Tepat Waktu  | 150      | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  | d | Penyelenggaraan musrenbang RPJMD                                    | Jumlah peserta yang menghadiri Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD                                      | Orang   | --  | --       | 600 org  | 1,424.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  | e | Penetapan RPJMD   | Keluarnya Peraturan Daerah tentang RPJMD tepat waktu dan Persentase hasil verifikasi RPJMD 2013-2018 | Waktu % | --  | --       | Tepat Waktu 90                                     | 1,328.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  | f | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                  | Pengendalian terhadap hasil rencana pembangunan daerah   | %       | 1   | 1,597.25 | 1  | 1,169.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  | g | Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran                         | Dokumen TEPPA  | Dok     | 1   | 1,500    | 92   | 2,200    | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  | h | Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah            | Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah                          | %       | 1   | 1,969    | 1  | 1,782.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  | i | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | Selesaiannya LKPJ Gubernur tepat waktu   | Waktu   | Tepat Waktu   | 975      | Tepat Waktu  | 474.83   | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |

|   |   |   |  |       |    |          |    |          |    |          |             |        |    |        |         |        |  |
|---|---|---|--|-------|----|----------|----|----------|----|----------|-------------|--------|----|--------|---------|--------|--|
|   | j | Gugus Kendali Pembangunan Kaltim                              | Dokumen Gugus Kendali  | Dok   | 1  | 1,000    | 80 | 875.12   | -- | --       | --          | --     | -- | --     | --      |        |  |
| 3 |   | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah</b> | <b>Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah jangka menengah</b> | %     | -- | --       | -- | --       | -- | --       | --          | --     | -- | --     | 80      | 1550   |  |
|   | a | Penyusunan Rancangan Awal RPJMD                               | Persentase hasil verifikasi rancangan awal RPJMD 2018-2023                   | %     | -- | --       | -- | --       | -- | --       | --          | --     | -- | --     | 60      | 1000   |  |
|   | b | Kaltim Summit   | Jumlah peserta yang menghadiri Penyelenggaraan Kaltim Summit                 | Orang | -- | --       | -- | --       | -- | --       | --          | --     | -- | --     | 500 org | 550    |  |
| 4 |   | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang</b>  | <b>Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah jangka panjang</b>  | %     | -- | --       | -- | --       | -- | --       | 90          | 650    | -- | --     | --      |        |  |
|   | a | Penyusunan Rancangan Perubahan RPJPD                          | Persentase hasil verifikasi dokumen rancangan RPJPD                          | %     | -- | --       | -- | --       | -- | --       | 80          | 550    | -- | --     | --      |        |  |
|   | b | Penetapan Perubahan RPJPD                                     | Keluarnya Peraturan Daerah tentang RPJPD tepat waktu                         | Waktu | -- | --       | -- | --       | -- | --       | Tepat Waktu | 100    | -- | --     | --      |        |  |
| 5 |   | <b>Program Kerjasama Pembangunan</b>                          | <b>Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan</b>      | %     | 50 | 3,098.80 | 60 | 1,381.38 | 65 | 1,000.00 | 65          | 900.00 | 70 | 846.00 | 70      | 846.00 |  |
|   | a | Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah                 | Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan             | %     | 50 | 3,098.80 | 60 | 1,381.38 | 65 | 1,000    | 65          | 900    | 70 | 846    | 70      | 846    |  |

|   |  |  |   |        |    |          |    |          |             |           |             |           |             |          |             |          |  |
|---|--|--|---|--------|----|----------|----|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|--|
| 6 | <b>Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah</b>  |  | <b>Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang efektif</b> | %      | -- | --       | -- | --       | 100         | 1,947.76  | 100         | 1,875.24  | 100         | 1,875.24 | 100         | 1,762.72 |  |
|   | a  | Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD   | Dokumen rancangan KUA, PPAS, APBD dan P-APBD yang disusun tepat waktu           | Waktu  | -- | --       | -- | --       | Tepat Waktu | 1,947.76  | Tepat Waktu | 1,875.24  | Tepat Waktu | 1,875.24 | Tepat Waktu | 1,762.72 |  |
| 7 | <b>Program Pengembangan data dan Informasi (mulai Th.2015 berubah menjadi Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial)</b> |  | <b>Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan</b>          | %      | 82 | 4,174.04 | 86 | 4,248.53 | 88          | 18,923.90 | 89          | 12,773.90 | 90          | 7,802.21 | 92          | 8,036.97 |  |
|   | a  | Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan | Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan                               | Jumlah | 16 | 3,180.99 | 14 | 3,612.33 | 14          | 3,433.90  | 14          | 3,433.90  | 14          | 3,262.21 | 14          | 3,196.97 |  |
|   | b  | Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah                                   | Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan SIPPD                               | Jumlah | -- | --       | -- | --       | 5           | 700       | 6           | 700       | 6           | 700      | 6           | 700      |  |
|   | c  | Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map  | Jumlah data statistik dan spasial yang dipublikasikan                           | Data   | -- | --       | -- | --       | 400         | 14,150    | 600         | 8,000     | 800         | 3200     | 1000        | 3500     |  |

|   |  |  |   |                   |                      |              |                      |              |        |          |        |          |        |          |        |          |    |
|---|--|--|---|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----|
|   | d  | Penyebarluasan capaian pembangunan daerah  | Tersampainya informasi pembangunan melalui web ke masyarakat  | Waktu             | --                   | --           | --                   | --           | 12     | 640      | 12     | 640      | 12     | 640      | 12     | 640      |    |
|   | e  | Sistem informasi dan updating data   | Tersampainya informasi pembangunan melalui web ke masyarakat  | Waktu             | 12                   | 993.05       | 12                   | 636.20       | --     | --       | --     | --       | --     | --       | --     | --       | -- |
|   | f  | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | Dokumen rancangan KUA, PPAS, APBD dan P-APBD yang disusun tepat waktu dan verifikasi dokumen Renstra, Renja | Waktu %<br>%<br>% | Tepat Waktu 70<br>70 | 3,627.8<br>0 | Tepat Waktu 80<br>80 | 2,972.0<br>8 | --     | --       | --     | --       | --     | --       | --     | --       | -- |
| 8 | <b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah</b> |  | <b>Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah</b>              | %                 | --                   | --           | --                   | --           | 90     | 7,843.68 | 60     | 7,701.11 | 75     | 6,386.00 | 90     | 6,475.23 |    |
|   | a  | Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional                    | Dokumen perencanaan KIPI MALOY  | Dok               | --                   | --           | --                   | --           | M2= 90 | 2,823.56 | M3= 60 | 2,762.51 | M3= 75 | 2,596.76 | M3= 90 | 2,240.96 |    |
| 9 | <b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>       |  | <b>Persentase hasil verifikasi dokumen KIPI MALOY</b>   | %                 | 67                   | 2,500.61     | 75                   | 3,052.50     | --     | --       | --     | --       | --     | --       | --     | --       |    |
|   | a  | Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional                    | dokumen KIPI MALOY  | %                 | 67                   | 2,500.61     | M2= 75               | 3,052.50     | --     | --       | --     | --       | --     | --       | --     | --       |    |

|    |  |  |   |          |           |            |           |            |           |              |           |              |           |               |           |               |  |
|----|--|--|---|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|
| 10 | <b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b> |  | <b>Persentase perencanaan pengembangan kab/kota</b>   | <b>%</b> | <b>35</b> | <b>750</b> | <b>35</b> | <b>625</b> | <b>40</b> | <b>625</b>   | <b>45</b> | <b>625</b>   | <b>55</b> | <b>160.98</b> | <b>65</b> | <b>587.51</b> |  |
|    | a  | Koordinasi perencanaan penanganan perumahan  | Jumlah Kab/Kota yang berperan serta dalam perencanaan penanganan perumahan  | Kab/Kota | 1         | 200        | 1         | 171.25     | 1         | 171.25       | 2         | 171.25       | 2         | 160.98        | 3         | 160.98        |  |
|    | b  | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan  | Jumlah Kab/Kota yang berperan serta dalam perencanaan persiapan implementasi pembangunan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan | Kab/Kota | 6         | 550        | 6         | 453.75     | 7         | 453.75       | 7         | 453.75       | 9         | 426.53        | 10        | 426.53        |  |
| 11 | <b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>                |  | <b>Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi</b>   | <b>%</b> | <b>--</b> | <b>--</b>  | <b>--</b> | <b>--</b>  | <b>70</b> | <b>2,660</b> | <b>75</b> | <b>2,603</b> | <b>80</b> | <b>2,446</b>  | <b>85</b> | <b>2,100</b>  |  |
|    | a  | Koordinasi Perencanaan pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif/Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor PDU dan Ekonomi Kreatif   | Lap      | --        | --         | --        | --         | 1         | 1,110        | 1         | 1,086        | 1         | 1,020.84      | 1         | 959.59        |  |

|    |   |   |   |     |           |                 |           |                 |    |          |    |          |    |          |    |          |  |
|----|---|---|---|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|--|
|    | b   | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup            | Dokumen rencana pembangunan sektor pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup     | Dok | --        | --              | --        | --              | 1  | 1,550.12 | 1  | 1,516.60 | 1  | 1,425.60 | 1  | 1,140.07 |  |
|    | c   | Penyusunan masterplan kawasan industri berbasis pangan                              | Dokumen masterplan kawasan berbasis pangan  | Dok | --        | --              | --        | --              | 2  | 1,387.50 | 2  | 1,357.50 | 2  | 1,276.05 | 2  | 1,199.49 |  |
| 13 | <b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>                    |   | <b>Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi</b>   | %   | <b>65</b> | <b>2,321.42</b> | <b>68</b> | <b>2,270.00</b> | -- | --       | -- | --       | -- | --       | -- | --       |  |
|    | a   | koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi                                   | Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor PDU dan Ekonomi Kreatif                                       | Lap | 6         | 2,321.42        | 6         | 2,270           | -- | --       | -- | --       | -- | --       | -- | --       |  |
| 14 | <b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b> |   | <b>Persentase koordinasi perencanaan pembangunan sektor pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b> | %   | <b>60</b> | <b>4,662</b>    | <b>65</b> | <b>4,431.60</b> | -- | --       | -- | --       | -- | --       | -- | --       |  |
|    | a   | Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup | Dokumen rencana pembangunan sektor pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup     | Dok | 2         | 2,650.50        | 2         | 2,171           | -- | --       | -- | --       | -- | --       | -- | --       |  |

|    |  |   |  |          |    |    |    |    |    |          |    |          |    |          |    |          |  |
|----|--|---|--|----------|----|----|----|----|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|--|
| 15 | <b>Program Pengarustamaan Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan Daerah</b> |   | <b>Persentase koordinasi perencanaan pengarustamaan perubahan iklim</b>                        | %        | -- | -- | -- | -- | 60 | 600      | 70 | 600      | 75 | 564      | 80 | 564      |  |
|    | a  | Fasilitasi dan pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon kab/kota | Jumlah perencanaan daerah kab/kota yang rendah karbon (RAD/GRK)                                | Kab/Kota | -- | -- | -- | -- | 1  | 300      | 2  | 300      | 4  | 282      | 5  | 282      |  |
|    | b  | Pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca    | Jumlah Kelembagaan penurunan emisi di kab/kota   | Kab/Kota | -- | -- | -- | -- | 1  | 300      | 2  | 300      | 4  | 282      | 5  | 282      |  |
| 16 | <b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah</b>   |   | <b>Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah</b> | %        | -- | -- | -- | -- | 75 | 4,417.98 | 77 | 7,004.35 | 80 | 6,960.09 | 85 | 5,866.92 |  |
|    | a  | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah                              | Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah                                   | Lap      | -- | -- | -- | -- | 1  | 2,556.79 | 1  | 2,501.51 | 1  | 2,351.42 | 1  | 2,010.34 |  |
|    | b  | Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah                                       | Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor prasarana wilayah                            | Lap      | -- | -- | -- | -- | 1  | 1,861.19 | 1  | 4,502.84 | 1  | 4,608.67 | 1  | 3,856.58 |  |

|    |  |  |   |          |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |  |
|----|--|--|---|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--|
| 17 | <b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b> |  | <b>Persentase koordinasi perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>                        | <b>%</b> | <b>67</b> | <b>3,173.48</b> | <b>5</b>  | <b>5,357.50</b> | --        | --              | --        | --              | --        | --              | --        | --              |  |
|    | a  | Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh | Laporan koordinasi rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh  | Lap      | 1         | 3,173.48        | 1         | 5,357.50        | --        | --              | --        | --              | --        | --              | --        | --              |  |
| 18 | <b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>          |  | <b>Persentase koordinasi perencanaan pembangunan sektor pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b> | <b>%</b> | <b>60</b> | <b>4,662</b>    | <b>65</b> | <b>4,431.60</b> | --        | --              | --        | --              | --        | --              | --        | --              |  |
|    | a  | Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah                         | Laporan koordinasi prasarana wilayah  | Lap      | 1         | 1,596.50        | 1         | 1,880.63        | --        | --              | --        | --              | --        | --              | --        | --              |  |
|    | a  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PPW)                                   | Laporan monitoring Bidang PPW   | %        | 1         | 444             | 1         | 379.98          | --        | --              | --        | --              | --        | --              | --        | --              |  |
| 19 | <b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur</b>    |  | <b>Persentase koordinasi perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Aparatur</b>                           | <b>%</b> | <b>--</b> | <b>--</b>       | <b>--</b> | <b>--</b>       | <b>70</b> | <b>1,754.94</b> | <b>80</b> | <b>1,729.88</b> | <b>85</b> | <b>1,626.08</b> | <b>90</b> | <b>1,626.08</b> |  |
|    | a  | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan                     | Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur                                     | Lap      | --        | --              | --        | --              | 1         | 1,159.30        | 1         | 1,134.24        | 1         | 1,066.18        | 1         | 1,066.18        |  |



|    |  |  |   |     |    |              |    |              |      |            |      |            |      |        |      |        |  |
|----|--|--|---|-----|----|--------------|----|--------------|------|------------|------|------------|------|--------|------|--------|--|
|    | b  | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Bidang Aparatur                                    | Laporan koordinasi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>bidang<br>pemerintahan dan<br>aparatur                    | Lap | -- | --           | -- | --           | 1    | 595.6<br>4 | 1    | 595.6<br>4 | 1    | 559.9  | 1    | 559.9  |  |
| 20 | <b>Program<br/>Perencanaan<br/>Pemerintahan dan<br/>Aparatur</b>                                       |  | <b>Persentase<br/>koordinasi<br/>perencanaan<br/>Pembangunan<br/>bidang<br/>Pemerintahan<br/>dan Aparatur</b> | %   | 62 | 2,088.<br>90 | 66 | 3,808.9<br>4 | --   | --         | --   | --         | --   | --     | --   | --     |  |
|    | a  | Kegiatan<br>Koordinasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Aparatur | Laporan koordinasi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>bidang<br>pemerintahan dan<br>aparatur                    | Lap | 2  | 1,596.5<br>0 | 2  | 3,213.3<br>0 | --   | --         | --   | --         | --   | --     | --   | --     |  |
| 21 | <b>Program<br/>Perencanaan<br/>Pembangunan<br/>Bidang<br/>Pengembangan<br/>Sumber Daya<br/>Manusia</b> |  | <b>Persentase<br/>koordinasi<br/>perencanaan<br/>Bidang<br/>Pengembangan<br/>Sumber Daya<br/>Manusia</b>      | %   | -- | --           | -- | --           | 62.5 | 1,516      | 67.5 | 1,516      | 72.5 | 1,425  | 77.5 | 1,425  |  |
|    | a  | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>kesejahteraan<br>rakyat                            | Laporan koordinasi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>kesejahteraan<br>rakyat                                   | Lap | -- | --           | -- | --           | 2    | 871        | 2    | 871        | 2    | 818.74 | 2    | 818.74 |  |
|    | b  | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Pendidikan, Mental<br>dan Spiritual                | Laporan koordinasi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>pendidikan,mental<br>dan spiritual                        | Lap | -- | --           | -- | --           | 1    | 645        | 1    | 645        | 1    | 606.30 | 1    | 606.30 |  |

|    |  |   |   |     |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |  |
|----|--|---|---|-----|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|--|
| 22 | <b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>                       |   | <b>Persentase koordinasi perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>              | %   | 60 | 1,978.30 | 60 | 1,516.00 | -- | --       | -- | --       | -- | --       | -- | --       |  |
|    | a  | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya       | Laporan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat                               | Lap | 1  | 1,428.30 | 1  | 871      | -- | --       | -- | --       | -- | --       | -- | --       |  |
|    | b  | Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan | Laporan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan, mental dan spiritual                   | Lap | 1  | 550      | 1  | 645      | -- | --       | -- | --       | -- | --       | -- | --       |  |
| 23 | <b>Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur</b>               |   | <b>Persentase hasil capaian perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan</b>                        | %   | 62 | 2,088.90 | 66 | 3,808.94 | -- | --       | -- | --       | -- | --       | -- | --       |  |
|    | a  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                | Laporan monitoring bidang Aparatur  | %   | 1  | 492.40   | 1  | 595.64   | -- | --       | -- | --       | -- | --       | -- | --       |  |
| 24 | <b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b> |   | <b>Persentase Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah</b> | %   | -- | --       | -- | --       | 70 | 1,649.04 | 80 | 1,363.39 | 90 | 1,516.59 | 95 | 1,166.59 |  |
|    | a  | Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah                   | Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah                   | %   | -- | --       | -- | --       | 70 | 1,649.04 | 80 | 1,363.39 | 90 | 1,516.59 | 95 | 1,166.59 |  |

|    |   |   |          |    |    |    |    |                                   |                 |                                   |                 |                                   |                 |                                   |                 |  |
|----|---|---|----------|----|----|----|----|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| 25 | <b>Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b> | <b>Persentase pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah</b>   | <b>%</b> | -- | -- | -- | -- | <b>83.83</b>                      | <b>4,367.32</b> | <b>87.89</b>                      | <b>3,689.90</b> | <b>97.26</b>                      | <b>3,468.51</b> | <b>100</b>                        | <b>3,399.14</b> |  |
| a  | Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD             | Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah<br>Selesainya LKPJ Gubernur tepat waktu<br>Evaluasi dokumen Gugus Kendali | %        | -- | -- | -- | -- | 75<br>LKPJ= Tepat waktu<br>GK= 80 | 2,844.49        | 80<br>LKPJ= Tepat waktu<br>GK= 80 | 2,200.00        | 85<br>LKPJ= Tepat waktu<br>GK= 90 | 2,068.00        | 90<br>LKPJ= Tepat waktu<br>GK= 90 | 2,026.64        |  |
| a  | Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan                        | Pengendalian terhadap hasil rencana pembangunan daerah<br>Evaluasi terhadap hasil penyerapan anggaran   | %        | -- | -- | -- | -- | 70                                | 1,522.83        | 72                                | 1,489.90        | 75                                | 1,400.51        | 80                                | 1,372.50        |  |